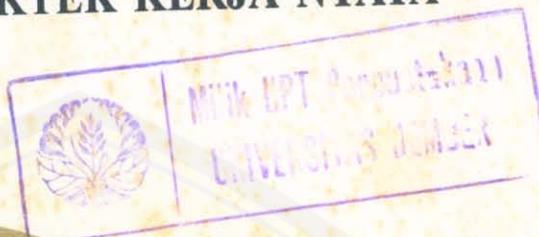
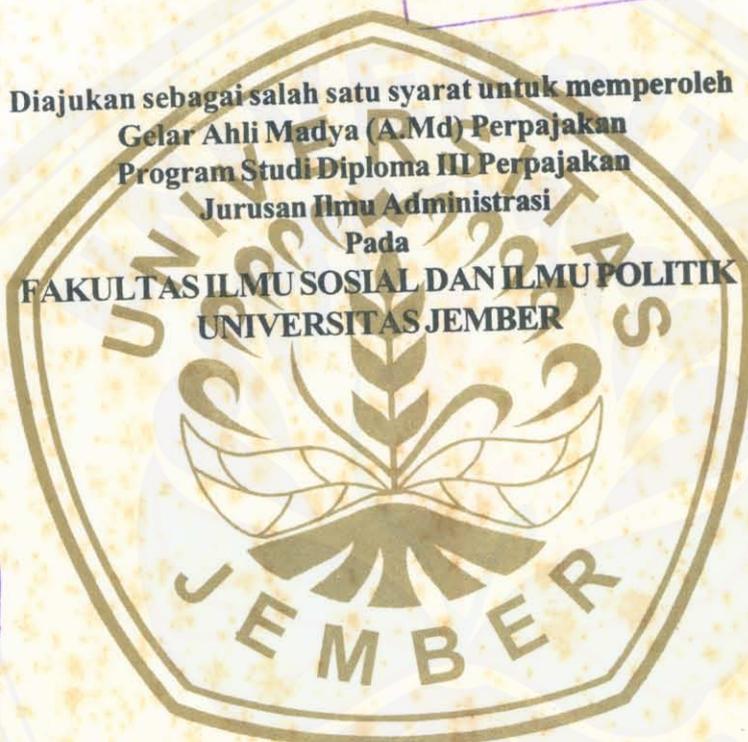


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS DOKTER LANGGANAN PEGAWAI  
KANTOR BANK INDONESIA JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**



Oleh :

*Yeny Rahmawati*  
NIM. 980903101021

Dosen Pembimbing :

Drs. Rahmat Murjana, MM  
NIP. 130 523 059

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001**

Atas :  
Kelas :  
Terima Tanggal: 25 SEP 2001  
No. Induk :

5  
B36.2  
RAH  
p

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

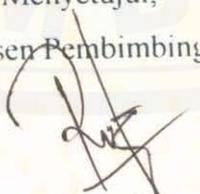
**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Nama : Yeny Rahmawati  
NIM : 980903101021  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal  
21 atas Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank  
Indonesia Jember

Jember, 21 Agustus 2001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Drs. Rahmat Murjana, MM

NIP : 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Yeny Rahmawati  
NIM : 980903101021  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter  
Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember**

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 September 2001  
Jam : 15.30  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota  

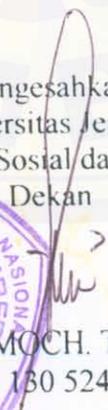

Drs. H. Fadholi Sa'id, SU  
NIP. 130 531 977

Ketua,  


Drs. Rahmat Murniana, MM  
NIP. 130 523 059

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

## MOTTO

Demi, sesungguhnya akan Kami uji kamu dengan suatu (cobaan), yaitu : ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, manusia dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar (atas cobaan itu). (Al – Baqarah : 155)

---

Tarjamah Al – Qur'an Al Karim oleh Prof. H. Mahmud Junus. 1989.

Bandung : PT. Al - Ma'arif.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “ **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember**”. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya. Sehubungan dengan hal ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Moch. Toerki; selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, MSi; selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi; selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Rahmat Murjana, MM; selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Sutrisno, MSi; selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Bapak Mochtari, selaku pimpinan Kantor Bank Indonesia Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan program Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Boaz Baan Lote, Bapak Sumantri, Bapak Bambang Murdadi, Ibu Titik, Ibu Martanti, Bapak Slamet, Bapak Djoko, Bapak Sumedi, Bapak Su'ud serta

seluruh staf Kantor Bank Indonesia Jember, yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.

8. Ibu dan Bapakku di Kediri, yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat serta segalanya untukku sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
9. Mas Lutfi, adikku Fahri dan Ahmad atas semangat dan kasih sayangnya.
10. **Nur Hidayat**, untuk segala bantuan dan dukungan dalam melalui "hari-hari tersibuk" penulis dan memberi arti hidup yang sesungguhnya.
11. Rekan-rekan semua kelas A D III Perpajakan angkatan 1998, atas kebersamaan dan suasana yang menyenangkan selama studi.
12. Teman-teman di Jawa 27 dulu semuanya, Mbak Ita untuk jadi pendengar dongengku yang setia, Upik teman gilaku, Mbak Septa, Mbak Eka, Mbak Tyas, Leni, atas suasana dan dukungan yang diberikan kepadaku.

Atas segala kebaikan dan kemurahan hatinya semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT, Amin. Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini mendatangkan manfaat bagi pembacanya.

Jember, Agustus 2001

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>II. GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA</b> .....	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Indonesia.....	6
2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	8
2.2.1 Tujuan Bank Indonesia.....	8
2.2.2 Tugas Bank Indonesia.....	8
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	9
2.3.1 Struktur Organisasi.....	9

2.3.2 Uraian Tugas .....	11
2.4 Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember .....	15
<b>III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>18</b>
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	18
3.1.1 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 .....	18
3.1.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember .....	20
3.1.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember .....	24
3.1.4 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember.....	26
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Kantor Bank Indonesia Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya .....	27
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kantor Bank Umum di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001.....	16
Tabel 2. Jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001 .....	17
Tabel 3. Susunan Kepegawaian Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001...	20
Tabel 4. Daftar Nama-nama Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001 .....	23
Tabel 5. Tarif Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001 .....	24

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Jember..... 10



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Indonesia Jember
- Lampiran 2. Persetujuan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3. Surat Tugas
- Lampiran 4. Daftar Hadir Mahasiswa Magang di Kantor Bank Indonesia Jember
- Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Indonesia Jember
- Lampiran 6. Daftar Pemeriksaan Kesehatan Pegawai/keluarga Bank Indonesia Jember Bulan Pebruari 2001
- Lampiran 7. Kwitansi Pembayaran
- Lampiran 8. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
- Lampiran 9. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 10. Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 11. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam membangun suatu tata-perekonomian nasional yang berlandaskan suatu demokrasi ekonomi menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, perlu digali dan diolah segala sumber-sumber penerimaan negara dengan menggunakan segala potensi dan daya kreasi negara itu sendiri.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menunjang pembiayaan pembangunan adalah perbankan. Perbankan sebagai suatu aparatur yang berkewajiban turut serta dalam menanggulangi masalah kesulitan negara dibidang ekonomi dan moneter perlu dinilai kembali untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Bank Sentral sebagai suatu Lembaga Negara yang bertugas membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter harus berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bank Sentral mempunyai tugas-tugas untuk mewujudkan tujuannya. Salah satu tugas Bank Sentral adalah memegang kas negara. Menurut Nopirin (1992:49), Bank Sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan (penerimaan dan pembayaran) pemerintah dengan cara :

- a. menerima pembayaran pajak;
- b. membantu melakukan pembayaran pemerintah (dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, misalnya); dan
- c. membantu penempatan serta pengedaran surat-surat berharga pemerintah.

Dalam upaya terwujudnya kemandirian pembiayaan pembangunan ekonomi bangsa, maka kesinambungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan harus digerakkan dengan dukungan dana yang dititikberatkan dari penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor pajak, karena pajak merupakan iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan kontraprestasi langsung yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, dalam Mardiasmo, 1999:1)

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Daerah. Oleh karena penulis mengambil pokok bahasan pada Pajak Penghasilan, maka penulis hanya membahas mengenai Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak dalam negeri maupun Subyek Pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (1999) Pajak Penghasilan sendiri dikelompokkan menjadi enam bagian, yaitu :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 2) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 3) Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- 4) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- 5) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final adalah :

- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja ;
  - 2) Uang pesangon ;
  - 3) Hadiah dan penghargaan perlombaan ;
  - 4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi ;
  - 5) Penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak atas penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut atas pembayaran penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penanaman modal dan penyerahan jasa tertentu.
  - d. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak atas penghasilan dari Luar Negeri dan yang dapat diperhitungkan dan dikreditkan hanya sebesar maksimum bila Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan tarif umum di Indonesia.

- e. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
- f. Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

Sehubungan dengan disiplin ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah, yang mengharuskan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata sebagai syarat kelulusan, maka penulis mengambil obyek Praktek Kerja Nyata pada Kantor Bank Indonesia Jember. Bank Indonesia selain sebagai pemegang kas negara juga sebagai Wajib Pajak Badan, Wajib Potong Pajak Penghasilan, Wajib Pungut dan Penyetor PPN dan PPn-BM.

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Bank Indonesia Jember, penulis berharap dapat mengetahui praktek perpajakan yang dilakukan disana dan membuat Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata sebagai tugas akhir penulis dengan mengambil judul :

**“ Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter  
Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember”**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Mengetahui dan mendiskripsikan Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember.
- c. Untuk membandingkan dan memadukan antara teori yang telah penulis peroleh dibangku kuliah dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Indonesia Jember.

- d. Dapat dijadikan bekal dalam berhubungan langsung dengan pekerjaan pada umumnya dan bidang perpajakan pada khususnya.

#### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan dan mengemukakan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan.
- b. Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa atau yang berkepentingan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya yang akan dan sedang mengadakan aktifitas Praktek Kerja Nyata.
- c. Bermanfaat bagi instansi yang dijadikan obyek Praktek Kerja Nyata sehingga dapat dijadikan bahan tambahan referensi dan kepustakaan pada Kantor Bank Indonesia Jember.

### 1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Bank Indonesia Jember, Jalan Gajah Mada No.224 Jember.

#### 1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai pada tanggal 26 Pebruari s.d 19 Maret 2001.

Adapun jam kerja yang dilaksanakan :

- a. Hari Senin s.d Jum'at mulai jam 07.00 – 16.15 WIB, istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB kecuali hari Jum'at istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB.
- b. Hari Sabtu dan Minggu libur kecuali petugas piket (Polri).



## II. GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA

### 2.1 Sejarah dan perkembangan Bank Indonesia

Berdasarkan sejarahnya, fungsi Bank Sentral pada masa penjajahan Pemerintah Belanda dilakukan oleh De Javasche Bank. Kesepakatan terhadap penunjukan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia selain alasan politik, alasan lain penunjukan itu adalah karena De Javasche Bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828 yang merupakan bank komersial sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia tenggara. Pada dasarnya pengesahan pendirian De Javasche Bank tanggal 24 Januari 1828 oleh Pemerintah Hindia Belanda dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan dari De Nederlansche Bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan besar Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. (Rahardjo, 2000:6)

Pada tanggal 8 April 1828 kantor bank dibuka untuk umum dan disiarkan lewat iklan pada *Bataviasche Courant* No.43, edisi 8 April 1828. Kantor ini menggunakan gedung yang terletak di Jakarta-Kota, yaitu Gedung Firma Mac Quoid Davidson & Co. dan disewa seharga f500 per bulan. Gedung ini kemudian dibeli oleh De Javasche Bank dan digunakan sebagai kantor Bank Indonesia hingga kini. (Rahardjo, 2000:7)

Keberadaan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral hanya bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara pendudukan Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942, tentara pendudukan Jepang merampas semua bank-bank di Hindia Belanda. Peran bank-bank itu diganti oleh tiga bank Jepang, yaitu Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Sedangkan fungsi Bank Sentral diambil-alih oleh *Nanpo Kaihatsu Ginko*, meskipun pada kenyataan dilapangan, yang menjalankan fungsi Bank Sentral adalah Yokohama Specie Bank untuk daerah Jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.

Fungsi sebagai bank sentral ini sempat terganggu ketika *Nederlandsche Indische Civiele Administratie* (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yang beredar, khususnya uang infasi Pemerintah Jepang (tanpa tahun) dan diikuti dengan penyerahan uang NICA. Tujuannya jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka. Dengan serangan dibidang ekonomi serta tekanan diplomasi dan senjata, akhirnya NICA berhasil menguasai sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Republik Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu daerah pendudukan yang dikuasai NICA dan daerah Republik. Pada periode ini, beredar 3 (tiga) jenis mata uang, yaitu uang infasi Jepang, uang NICA, dan uang Republik Indonesia (ORI). (Rahardjo, 2000:9)

Ketika Jepang menyerah, *Nanpo Kaihatsu Ginko* dan bank-bank Jepang lainnya dilikuidasi dibawah pengawasan De Javasche Bank. Fungsi Bank Sentral di wilayah Indonesia dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu masih berbentuk Jajasan Peosat Bank Indonesia (JPBI). De Javasche Bank sendiri menjalankan fungsi Bank Sentral di daerah pendudukan NICA. Namun hingga 17 Agustus 1945, De Javasche Bank belum beroperasi. Bank sirkulasi itu baru menjalankan kembali usahanya pada 14 Maret 1946.

Hal tersebut dinilai sebagai kebutuhan negara yang merdeka disatu pihak negara membutuhkan sebuah Bank Sentral yang bertugas menjaga dan memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugaskan untuk membiayai pembangunan.

Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkanlah UU No.2 Prp. Tahun 1946 tentang Pembentukan dan Penetapan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi dan Bank Sentral Milik Negara.

Pada tanggal 15 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi berdasarkan UU No. 24 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 120 tahun 1951) dan pada tanggal 29 Mei 1953 Presiden mengesahkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Bank Indonesia dan dinyatakan mulai berlaku

1 Juni 1953. Oleh karena itu, tidak salah jika tanggal itu dijadikan hari terbentuknya Bank Indonesia.

Kantor Bank Indonesia Jember diresmikan pada tanggal 23 Desember 1959 dengan lokasi gedung berada di sebelah timur Alun-alun Jalan Ahmad Yani No. 5 Jember.

Dalam perkembangannya tepat diulangtahunnya ke-35 atau 8 Februari 1993 kegiatan operasional dipindah ke gedung kantor baru, Jalan Gajah Mada No. 224 Jember.

## 2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

### 2.2.1 Tujuan Bank Indonesia

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.

### 2.2.2 Tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :

#### a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam Pasal 10 UU-BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort*, yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

c. Mengatur dan mengawasi bank

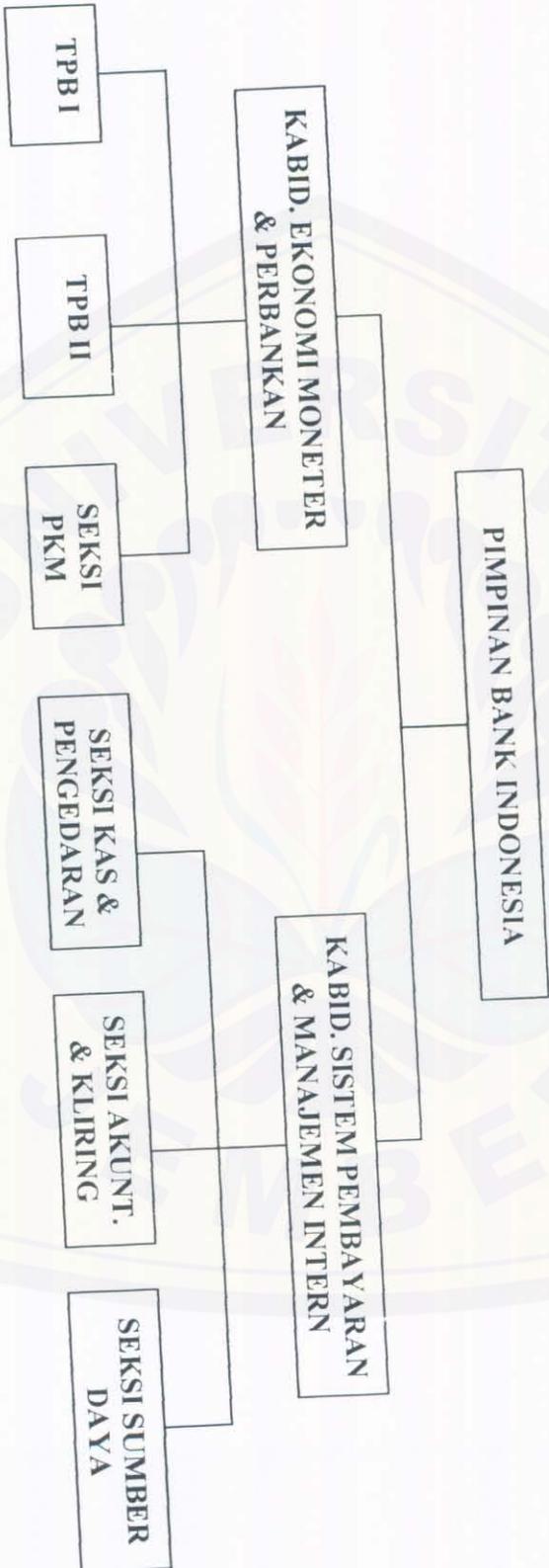
Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.

## **2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

### **2.3.1 Struktur Organisasi**

Didalam organisasi, pasti terdapat suatu hubungan diantara orang-orang yang menjalankan aktifitas tersebut sehingga makin banyak kegiatan yang dikerjakan dalam suatu organisasi, makin kompleks pula hubungan yang terdapat didalamnya. Susunan organisasi serta pembagian tugas yang baik sangat membantu anggotanya secara lebih efektif dan mudah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi garis pada Kantor Bank Indonesia Jember seperti pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI Kantor Bank Indonesia Jember



Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember Th. 2001

### 2.3.2 Uraian Tugas

#### a. Tim Pengawas Bank (TPB)

##### 1) Pembinaan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pelaksanaannya yaitu pengawasan pasif dan aktif.

##### a) Pengawasan pasif

Kantor Bank Indonesia Jember diam dalam artian menerima laporan-laporan dari BPR yang kemudian diproses dan dianalisa. Setelah diproses dan dianalisa Bank Indonesia Jember memberikan tanggapan atas laporan tersebut dengan Surat Pembinaan mengenai kondisi bank tersebut.

Jenis laporan dari BPR adalah :

##### (1) Menurut waktu atau berkala

Laporan menurut waktu atau berkala ini dibagi atas :

##### (a) Laporan bulanan, terdiri dari :

1)) Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba disertai dengan laporan normatif dan laporan batas minimum pemberian kredit.

2)) Laporan simpanan pihak ketiga.

Laporan ini berhubungan dengan program pemijaman.

##### (b) Laporan triwulanan

Laporan triwulanan ini sekarang sudah tidak ada sejak tahun 1999.

##### (c) Laporan semesteran, terdiri dari :

##### 1)) Laporan Dewan Komisaris

Komisaris harus menjelaskan realisasi yang dicapai dengan rencana kerja. Apakah sasaran yang dicapai sudah sesuai dengan rencana kerja atau tidak. Kalau tidak apa sebab atau hambatannya.

##### 2)) Laporan Publikasi

Laporan Keuangan Bank yang meliputi Neraca dan Rugi/Laba yang harus dipublikasikan kepada masyarakat

luas. Laporan ini cukup ditempel di papan pengumuman di kantornya.

(d) Laporan Tahunan terdiri dari:

1)) Rencana kerja tahunan yaitu laporan bank mengenai rencana kerja bank. Laporan ini lebih baik dirinci setiap bulan.

2)) Laporan keuangan tahunan  
Setiap bank harus melaporkan posisi pertanggungjawaban direktur kepada RUPS.

(2) Insidental

Laporan ini ada kalau terjadi :

(a) perubahan kepemilikan dan pengurus bank;

(b) pindah alamat kantor;

(c) pembukaan kantor cabang;

(d) penutupan kantor cabang; atau

(e) perubahan nama bank.

b) Pengawasan aktif

Pengawasan ini dilakukan dengan cara langsung memeriksa ke bank yang akan diperiksa. Hal ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dan lamanya tergantung volume besarnya bank tersebut.

Pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah operasional bank sudah sesuai dengan ketentuan, ada atau tidaknya pelanggaran baik di kebijakan maupun pelaksanaannya.

2) Pengawasan Bank Umum

Pengawasan ini hanya untuk hal-hal tertentu.

Pengawasan terhadap bank umum ini sebenarnya bukan wewenang Kantor Bank Indonesia Jember. Wewenang ini dimiliki Kantor Bank Indonesia Pusat maupun koordinator. Dalam hal-hal tertentu oleh Kantor Bank Indonesia koordinator diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal tertentu tersebut.

Hal-hal tertentu tersebut adalah :

a) pimpinan atau pengurus bank umum di wilayah kerja Kantor Bank

Indonesia Jember harus izin dulu,

b) pembukaan dibawah kantor cabang.

b. Seksi Sumber Daya

1) Sumber Daya

- a) Pembayaran gaji, dan Emolumen lainnya kepada pegawai.
- b) Pembayaran pensiun.
- c) Proses pinjaman untuk pegawai dan pensiun.
- d) Potongan gaji pegawai dan pensiun.
- e) Biaya kesehatan pegawai dan pensiun.
- f) Pembayaran kepada dokter dan apotik langganan.
- g) SPK dengan dokter apotik langganan.
- h) Surat jaminan kepada rumah sakit untuk pegawai yang dirawat.
- i) Tata usaha surat lamaran.
- j) Proses tes dalam rangka penerimaan pegawai sesuai petunjuk Kantor Pusat.
- k) Laporan perubahan data pegawai.

2) Pengamanan

- a) Pengawasan kegiatan kas keliling.
- b) Pengamanan Gedung kantor, pegawai dan tamu.
- c) Penyelesaian surat-surat senjata api (senpi).
- d) Upacara bendera.
- e) Latihan keterampilan.

3) Pemeliharaan

- a) Pemeliharaan kendaraan dinas.
- b) Pemeliharaan perabot kantor.
- c) Penyelesaian tagihan dalam rekanan.
- d) Lelang, contohnya inventaris kantor dan rbi.
- e) Pengadaan inventaris kantor dan ATK.
- f) Pemeliharaan gedung kantor dan mesin-mesin.
- g) Pemeliharaan inventaris kantor.
- h) Sewa mesin fotokopi.
- i) Penyelesaian tagihan di rekanan.
- j) Laporan konservasi energi.

4) Logistik

- a) Sekretaris PBI.
- b) Rapat-rapat dinas.
- c) Kardex pegawai.
- d) Opertor telepon, teleks, fax.

- e) Tata usaha aplikasi teleks.
  - f) Arsip fax.
  - g) Tata usaha surat keluar/masuk (ekspedisi).
  - h) Tata usaha arsip.
  - i) Penyiangan arsip.
- c. Seksi Akunting dan Kliring
- 1) Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara.
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing serta menyelesaikan tugas akhir transaksi pembayaran antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- d. Seksi Kas dan Pengedaran
- Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang antara lain :
- 1) Mengeluarkan dan mengedarkan uang untuk masyarakat.
  - 2) Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan yang lain.
  - 3) Melakukan penukaran uang yang cacat atau tidak layak untuk diedarkan.
  - 4) Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang tergantung pada tingkat kerusakannya.
  - 5) Mencabut, menarik serta memusnahkan uang, dari peredaran.
- e. Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (PKM)
- 1) Melaksanakan penelitian dalam rangka membantu Kantor Pusat Bank Indonesia dalam rangka mengambil keputusan di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran.
  - 2) Mengelola data perbankan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember yang meliputi :
    - a) Laporan Bank Umum.
    - b) Laporan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
    - c) Sistem Informasi Penyediaan Dana (SIPD).
    - d) Informasi Data Debitur Individual (IDI).

- 3) Menyimpulkan data penting yang bersumber dari instansi terkait menyangkut hal-hal penting yang berguna bagi Bank Indonesia untuk pengambilan keputusan, misalnya:
  - a) data perkembangan serta potensi daerah;
  - b) data harga, Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi daerah;
  - c) data ekspor dan impor.
- 4) Melakukan Survey Kelayakan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan secara triwulanan dan dilaporkan ke Bank Indonesia Surabaya.
- 5) Menyampaikan buku-buku dan penerbitan dari Kantor Pusat Bank Indonesia dan sumber-sumber lain untuk diteruskan kepada instansi terkait, misalnya Weekly Report, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (STATDA), Statistik Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah (SPEKDA).
- 6) Pengelolaan informasi mengenai kurs valuta asing setiap hari, mengadministrasikan laporan bulanan dan perdagangan valas.
- 7) Meneruskan bantuan luar negeri yang dilaksanakan melalui Kantor Kas Negara Jember dan Banyuwangi kepada proyek-proyek pemerintah.
- 8) Pengelolaan perpustakaan (melayani mahasiswa dan keluarga Bank Indonesia untuk studi literatur dan permintaan informasi lainnya).
- 9) Lain-lain :

Sejak berlakunya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia diberlakukan, maka Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), namun ada pekerjaan yang masih ditangani sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis pekerjaan itu meliputi:

  - a) Pemberian bantuan teknis kepada perbankan dalam rangka pengembangan pengusaha kecil dan mikro sampai dengan tahun 2002.
  - b) Proyek Kredit Mikro (PKM) berupa proyek pemberian kredit kepada pengusaha mikro melalui BPR yang sumber dananya dari Asia Development Bank (ADB), perjanjian dilakukan antara Bank Indonesia, ADB dan pemerintah sampai dengan akhir Juni 2001.

#### **2.4 Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember**

Lingkup wilayah kerja Bank Indonesia Jember merupakan wilayah kerja Pembantu Gubernur Jawa Timur Wilayah VII yang berkedudukan di Jember.

Wilayah kerja Bank Indonesia Jember (daerah Eks Karesidenan Besuki) terletak pada  $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 35' - 8^{\circ} 48'$  Lintang Selatan dan terdiri dari Kabupaten masing – masing sebagai berikut :

- a. Kabupaten Jember
- b. Kabupaten Banyuwangi
- c. Kabupaten Situbondo
- d. Kabupaten Bondowoso

Luas areal mencapai  $11.749,1 \text{ Km}^2$  atau 24,5% dari wilayah Propinsi Jawa Timur, dengan rician luas masing-masing Kabupaten sebagai berikut :

- a. Jember  $2.948,8 \text{ Km}^2$
- b. Banyuwangi  $5.782,5 \text{ Km}^2$
- c. Situbondo  $1.457,7 \text{ Km}^2$
- d. Bondowoso  $1.560,1 \text{ Km}^2$

Batas-batas wilayah daerah :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- c. Sebelah Timur : Selat Bali
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

Sampai dengan akhir Desember 2000 terdapat 75 Kantor Cabang Bank Umum dan 77 BPR, dengan rincian per Kabupaten sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Kantor Bank Umum  
di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001**

Kabupaten	Bank Pemerintah	Bank Swasta	Total
Jember	9	27	3
Banyuwangi	8	15	23
Situbondo	5	4	9
Bondowoso	3	4	7
Jumlah	25	50	75

Sumber data: Kantor Bank Indonesia Jember tahun 2001

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kantor bank umum di Jember terdapat 9 bank pemerintah dan 27 bank swasta, di Banyuwangi

terdapat 8 bank pemerintah dan 15 bank swasta, di Situbondo terdapat 5 bank pemerintah dan 4 bank swasta serta di Bondowoso terdapat 3 bank pemerintah dan 4 bank swasta.

Sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001**

Uraian	Jember	Banyuwangi	Situbondo	Bondowoso	Jumlah
KP	30	21	9	4	64
KC	3	3	0	0	6
KPK	4	3	0	0	7
Jumlah	37	27	9	4	77

Sumber data: Kantor Bank Indonesia Jember tahun 2001

Keterangan:

- KP : Kantor Pusat  
 KC : Kantor Cabang  
 KPK : Kantor Pelayanan Kas

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui pula bahwa jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat di Jember sebanyak 37 BPR, di Banyuwangi sebanyak 27 BPR, di Situbondo sebanyak 9 BPR dan di Bondowoso sebanyak 4 BPR.



### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pada pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata yang telah ditetapkan oleh pihak fakultas dimana penulis mengambil obyek pada Kantor Bank Indonesia Jember. Dengan program Praktek Kerja Nyata ini nantinya timbul kewajiban untuk menulis laporan hasil program Praktek Kerja Nyata sebagai tugas akhir penulis yang termasuk sebagai salah satu syarat kelulusan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Indonesia Jember bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan kerja dibidang perpajakan pada khususnya dan bidang kerja lain pada umumnya sebagai bekal untuk terjun langsung dalam dunia kerja.

Kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Bank Indonesia Jember tidak hanya pada satu bidang atau satu seksi saja tetapi penulis ditempatkan di dua seksi yang terdapat disana yaitu pada seksi PKM (Pelaksanaan Kebijakan Moneter) dan pada seksi Sumber Daya yang termasuk didalamnya bagian ekspedisi. Jadwal kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 3.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

##### a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

##### b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- 2) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
  - 3) Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
  - 4) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
  - 5) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- c. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final adalah :
- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;
  - 2) Uang pesangon;
  - 3) Hadiah dan penghargaan perlombaan;
  - 4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi;
  - 5) Penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI, dan Pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain

penghasilan selain gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

### 3.1.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember

Dalam suatu organisasi, perusahaan, lembaga atau badan usaha apapun yang didirikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pastilah didalamnya terdapat tenaga kerja. Dikarenakan manusia sebagai tenaga kerja merupakan faktor produktifitas yang memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan suatu usaha ataupun tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu agar produktifitas karyawan dapat ditingkatkan, berbagai faktor harus dapat dipenuhi antara lain : pendidikan dan latihan keterampilan, gizi / nutrisi dan kesehatan, bakat / bawahan, motifasi / kemauan dan kesempatan kerja. (Soeprihanto, 1987)

Sesuai dengan judul yang diangkat, penulis hanya membahas masalah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter langganan pegawai.

Demikian halnya dengan Kantor Bank Indonesia Jember juga terdapat sejumlah pegawai yang membantu mewujudkan tujuan atau sasaran lembaga. Dalam Bank Indonesia Jember terdapat beberapa seksi seperti Tim Pengawasan Bank I dan II, seksi PKM, seksi Kas dan Penedaran, seksi Akunting dan Kliring serta seksi Sumber Daya yang disetiap bidang tersebut tidak dapat lepas dari tenaga kerja yang pelaksanaanya berjumlah 59 orang dengan susunan sebagai berikut :

**Tabel 3. Susunan Kepegawaian Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001**

PEGAWAI	G.VI	G.V	G.IV	G.III	G.II	G.I
Pimpinan Bank Indonesia	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang SPMI	-	1	-	-	-	-
Kepala Bidang EMP	-	1	-	-	-	-

Kepala Seksi / PB	-	-	5	-	-	-
Staf / PBY	-	-	-	13	-	-
Kasir I	-	-	-	1	-	-
PTU	-	-	-	-	12	-
APB	-	-	-	-	2	-
Sekretaris Yuniior	-	-	-	-	1	-
Operator	-	-	-	-	1	-
Satpam	-	-	-	-	5	-
Tchnik	-	-	-	-	1	-
Kasir II	-	-	-	-	3	-
Kasir	-	-	-	-	10	-
Pesuruh	-	-	-	-	-	1
Pekerja	-	-	-	-	-	1
JUMLAH	1	2	5	14	35	2

Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember terhitung 02.01.2001

Keterangan Tabel :

- G. I : Golongan I
- G. II : Golongan II
- G. III : Golongan III
- G. IV : Golongan IV
- G. V : Golongan V
- G. VI : Golongan VI

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada golongan VI sebanyak 1 orang, golongan V sebanyak 2 orang, golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 14 orang, golongan II sebanyak 35 orang dan pada golongan I sebanyak 2 orang pegawai.

Dengan jumlah pegawai yang sebanyak 59 orang tersebut maka penanganan masalah kesehatan terhadap tenaga kerja juga menjadi salah satu program yang penting diantaranya dengan pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaannya maupun penyakit umum yang digunakan untuk melindungi para pegawai terhadap / dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. (Soeprihanto, 1987)

Kantor Bank Indonesia Jember didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin oleh seorang dokter yang disetujui oleh pimpinan yang biasa disebut dengan dokter koordinator dan dijalankan oleh dokter langganan pegawai lainnya yang kemudian diadakan kontrak kerjasama antara pihak Kantor Bank Indonesia Jember dengan dokter tersebut.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka telah timbul kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Jember sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 21 Ayat (1) huruf (d) tentang Pajak Penghasilan yaitu melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutama dalam membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dokter yang telah ditetapkan adalah 15 % atas perkiraan penghasilan neto yang dibayar atau terutang kepada tenaga ahli. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40 % dari penghasilan bruto berupa honorarium atau penghasilan lain dengan nama apapun. Nama-nama dokter langganan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Daftar Nama-nama Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001**

No.	KETERANGAN	Nama Dokter
1	Dokter Umum	dr. Arif Wicaksono dr. Heru Sutandio dr. M. Cholid Bakhtir dr. Abdul Malik *) dr. Hartono Eka Putra dr. Emil Nuralim
2	Dokter Spesialis terdiri dari : a. Spesialis Gigi  b. Spesialis Kandungan c. Spesialis Anak d. Spesialis THT  e. Spesialis Mata f. Spesialis Syaraf g. Spesialis Kulit	dr. Sutikno Iskak dr. Endang Wahyuni dr. Sri Anggraini dr. Endang Ma'ruf R. dr. Soesatyo PS. dr. Djoko Kuntoro dr. Bambang Indra dr. Lutfi Zein dr. Supraptiningsih dr. Johny S. Erlan

\*) Dokter Koordinator Kantor Bank Indonesia Jember  
Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember Pebruari 2001

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa banyaknya dokter langganan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember keseluruhan sejumlah 16 orang termasuk satu dokter koordinator dengan perincian 6 orang dokter umum dan 10 orang dokter spesialis.

### 3.1.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter langganan pegawai dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Penghitungan atas honorarium dokter koordinator

Sesuai dengan kontrak kerja sama bahwa besarnya honorarium dokter koordinator yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat adalah sebesar Rp. 319.150,00 yang pada akhir bulan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan diatas. Selain itu dokter koordinator juga melakukan pemeriksaan para pegawai yang datang berobat yang nantinya akan ditagihkan kepada Kantor Bank Indonesia Jember. Jadi, untuk dokter koordinator akan memperoleh dua penghasilan yaitu penghasilan dari honorarium sebagai dokter koordinator dan penghasilan dari hasil melakukan pemeriksaan kesehatan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember.

b. Penghitungan atas penghasilan dokter langganan lain bukan koordinator dari hasil pemeriksaan unit kesehatan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember.

Penghasilan ini berdasarkan atas sejumlah biaya pemeriksaan yang ditagihkan kepada Kantor Bank Indonesia Jember.

Sedangkan tarif biaya pemeriksaan untuk dokter langganan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Tarif Dokter Langgan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember Tahun 2001**

No.	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Dokter Umum	Rp 10.000,00	Untuk sekali pemeriksaan ke dokter langganan.
2.	Dokter Spesialis	Rp 25.000,00	

Sumber : Kantor Bank Indonesia Jember 2001

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa tarif untuk dokter umum untuk sekali pemeriksaan sebesar Rp 10.000,00 dan Rp 25.000,00 untuk dokter spesialis.

Prosedur penagihan dokter langganan pegawai kepada Kantor Bank Indonesia Jember adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai yang sakit berobat ke dokter langganan Kantor Bank Indonesia Jember sebelumnya mengisi formulir yang telah diberikan oleh Kantor Bank Indonesia Jember baik yang terdapat di kantor maupun di tempat dokter langganan yang akan dituju.
- b. Berdasarkan jumlah pasien yang ditangani tersebut maka dokter langganan melakukan penagihan kepada Kantor Bank Indonesia Jember dengan menyertakan :

- 1) Formulir biaya pemeriksaan unit kesehatan dan langganan bank sebanyak jumlah pasien yang ditangani.
- 2) Daftar pemeriksaan kesehatan pegawai dan keluarganya.
- 3) Kwitansi

Dalam kwitansi ini harus dicantumkan pula pernyataan atau suatu perintah untuk memindahbukukan penghasilan tersebut ke rekening yang diminta oleh dokter langganan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam proses pemindahbukuan.

Berdasarkan berkas tagihan tersebut, Kantor Bank Indonesia Jember kemudian melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh dokter langganan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember sebelum dipindahbukukan ke rekening dokter langganan yang bersangkutan. Adapun contoh dari penghitungan besarnya penghasilan yang diterima oleh dokter langganan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan para pegawai Kantor Bank Indonesia Jember dan atas dasar honorarium sebagai dokter koordinator adalah sebagai berikut :

**Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :**

Dokter Abdul Malik selain sebagai dokter koordinator juga merupakan dokter langganan pegawai Kantor Bank Indonesia Jember. Pada bulan Pebruari 2001 telah menerima pasien (pegawai yang berobat) sebanyak 47 orang.

Jadi, penghitungan atas penghasilan dr. Abdul Malik adalah sebagai berikut :

## a. Penghitungan atas penghasilan sebagai dokter koordinator

Honorarium	Rp 319.150,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium	
$15\% \times 40\% \times \text{Rp } 319.150,00 =$	<u>Rp 19.150,00</u>
Jumlah yang diterima oleh dr. Abdul Malik	Rp 300.000,00

## b. Penghitungan atas penghasilan dari hasil pemeriksaan kesehatan pegawai/ keluarga pegawai

Penghasilan atas jasa	
$47 \text{ orang} \times \text{Rp } 10.000,00$	Rp 470.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan jasa	
$15\% \times 40\% \times \text{Rp } 470.000,00 =$	<u>Rp 28.200,00</u>
Jumlah yang diterima oleh dr. Abdul Malik dari hasil pemeriksaan kesehatan pegawai/keluarganya	Rp 441.800,00

**3.1.3 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Dokter Langganan Pegawai Kantor Bank Indonesia Jember**

- a. Pembayaran atas penghasilan dokter langganan oleh Kantor Bank Indonesia Jember dipindahbukukan sesuai dengan permintaan dokter langganan pegawai dengan nomor rekening yang sudah ditentukan yang terdapat pada kwitansi tagihan. Kantor Bank Indonesia Jember kemudian membuat APA (Aplikasi Pembebanan Anggaran) dengan mendebet Mata Anggaran (MA) serta mengkredit rekening biaya pemeriksaan dokter untuk pegawai / keluarga pegawai sejumlah yang harus dibayar oleh

Kantor Bank Indonesia Jember dan mengkredit rekening penampungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dari penghasilan tersebut.

- b. APA yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi diserahkan kepada bagian Akunting. Kemudian bagian Akunting membuat nota lagi yang baru untuk dipindahbukukan ke rekening yang dimaksudkan.
  - c. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terjadi apabila ada tagihan dari dokter langganan yang untuk sementara ditampung dalam rekening Penampungan. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara dilakukan dengan memindahbukukan rekening Penampungan ke rekening Kas Negara yang ada di Kantor Bank Indonesia Jember paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak dan apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Sarana untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :
- 1) SPT. Masa Pajak Penghasilan pasal 21
  - 2) Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
  - 3) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 lembar ke-2
  - 4) SSP lembar ke-3

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Kantor Bank Indonesia Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Bank Indonesia Jember sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah

diterapkannya peraturan perundang-undangan yang baru yaitu tentang pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter langganan pegawai . Kantor Bank Indonesia Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengenai penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter langganan pegawai sampai saat ini selalu tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda sebesar Rp 25.000,00 ataupun berupa bunga 2 % per bulan.





#### IV. PENUTUP

Tahap akhir penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata adalah penarikan atau pengambilan kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dimuka. Dari uraian dimuka dapat diketahui bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Bank Indonesia Jember sudah baik dan relevan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengacu pada UU No. 10 tahun 1994 yang telah diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 21, mulai dari melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter langganan pegawai. Di samping itu, Kantor Bank Indonesia Jember juga sangat memperhatikan masalah penanganan kesehatan terhadap tenaga kerjanya agar terhindar dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja salah satunya dengan mengadakan kerja sama dengan dokter yang ada di Jember. Dengan demikian, Kantor Bank Indonesia Jember diharapkan dapat menjadi panutan bagi instansi / lembaga yang lain atas ketaatannya sebagai wajib Pajak yang bijak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Akhirnya, semoga laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat mendatangkan manfaat bagi pengguna semuanya baik penulis sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 1999. *Ikhtisar UU BI No.23*. Jakarta: Biro Gubernur.
- Departemen Keuangan RI. 2000. *UU Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Ditjen Pajak. 1999. *Berita Pajak*. (Agustus, XXXII). No. 1400. Jakarta.
- , 2000. *Berita Pajak*. (Januari, XXXII). No. 1411. Jakarta.
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan edisi 7*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nopirin. 1992. *Ekonomi Moneter (buku I, edisi 4)*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahardjo, M.D. 2000. *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*. Jakarta: Cisesindo.
- Soeprihanto, J. 1987. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaprakosa, S, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Lampiran 1

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA  
DI KANTOR BANK INDONESIA JEMBER  
Jl. Gajah Mada No. 224 JEMBER**

No.	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1.	Minggu I	a. Orientasi di tempat Praktek Kerja Nyata <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan dan perkenalan peserta Praktek Kerja Nyata kepada karyawan di seksi-seksi yang ditempati.</li> <li>2. Pengarahan dan pemberian materi mengenai sekilas tentang Kantor Bank Indonesia Jember.</li> </ol> b. Tugas <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendistribusikan buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (STATDA) bulan November 2000 yang akan dikirim kepada langganan Kantor Bank Indonesia Jember.</li> <li>2. Membuat daftar bunga Bank Perkreditan Rakyat peserta PKM di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember periode Mei dan Juni 2001.</li> <li>3. Regristasi surat masuk dan surat keluar untuk pihak ketiga dan antar Kantor Bank Indonesia.</li> <li>4. Mengisi formulir BPR KL BPR-PKM untuk diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro (Kartu Tata Usaha tambahan).</li> </ol>
2.	Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Regristasi surat masuk dan surat keluar baik</li> </ol>

		<p>untuk pihak ketiga maupun antar Kantor Bank Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Membuat daftar ekspedisi untuk pihak ketiga.</li> <li>7. Mengarsip lamaran pekerjaan.</li> <li>8. Mengarsip biaya pemeriksaan pegawai / keluarga dan pensiunan / keluarga.</li> <li>9. Mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan perpajakan atas tagihan biaya pemeriksaan dokter, mengenai tarif biaya pemeriksaan dokter dan keterangan tentang alur penagihan biaya pemeriksaan dokter dan biaya tagihan apotik.</li> </ol>
3.	Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Regristasi surat masuk dan surat keluar baik untuk pihak ketiga maupun antar Kantor Bank Indonesia.</li> <li>11. Membuat Daftar Ekspedisi untuk pihak ketiga.</li> <li>12. Membuat Rekapitulasi Data Tabungan, Deposito dan Kredit yang diberikan pada sektor ekonomi se wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember.</li> <li>13. Mendistribusikan Laporan Mingguan Bank Indonesia (Weekly Report) dan buku Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (Indonesian Financial Statistics) bulan Desember 2000 untuk dikirimkan kepada langganan.</li> <li>14. Melakukan pengecekan Laporan Bulanan Bank Umum untuk wilayah Kerja Bank Indonesia Jember.</li> </ol>

		<p>15. Pelepasan peserta Praktek Kerja Nyata dari Kantor Bank Indonesia Jember dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan atas kesempatan, bantuan dan bimbingan selama Praktek Kerja Nyata.</p>
--	--	---





**BANK INDONESIA**

No.3/ 2 /DSDM/PLP/Jr

Jember, 31 Januari 2001

Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember

Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto

JEMBER

Perihal : Persetujuan Praktek Kerja Lapangan

Menunjuk surat Saudara No. 295/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 29 Januari 2001, perihal permohonan tempat magang dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat mempertimbangkan permohonan saudara untuk melaksanakan praktek kerja selama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Februari s/d 19 Maret 2001 di kantor kami.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut diminta kepada Sdr Nur Hidayat, Sdri Yeny Rahmawati dan Sdri Suzana untuk menghubungi Kantor Bank Indonesia Jember.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA JEMBER

  
Moch. Harijono

Kepala Bidang

 2/2001



Surat Tugas

Nomer : 512 / J25.2.1/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Nur Hidayat	98-1115	Ketua
02	Yenny Rahmawati	98-1021	Wakil ketua
03	Suzana	98-1008	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Bank Indonesia Cabang Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 FEB 2001  
 Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG DI KBI JEMBER

No.	Nama Pemegang	Tgl. 26.2.01	Tgl. 27.2.01	Tgl. 28.2.01	Tgl. 01.3.01	Tgl. 02.3.01	Tgl. 06.3.01	Tgl. 07.3.01	Tgl. 08.3.01	Tgl. 09.3.01	Tgl. 12.3.01	Tgl. 13.3.01	Tgl. 14.3.01
1.	Nur Hidayat	<i>Nur Hidayat</i>											
	Yenny Rahmawati	<i>Yenny Rahmawati</i>											
	Suzana	<i>Suzana</i>											

No.	Name Pemegang	Tgl. 15.3.01	Tgl. 16.3.01	Tgl. 19.3.01
1.	Nur Hidayat	<i>Nur Hidayat</i>	<i>Nur Hidayat</i>	<i>Nur Hidayat</i>
	Yenny Rahmawati	<i>Yenny Rahmawati</i>	<i>Yenny Rahmawati</i>	<i>Yenny Rahmawati</i>
	Suzana	<i>Suzana</i>	<i>Suzana</i>	<i>Suzana</i>



Jember, Maret 2001

*[Signature]*  
Kepala Seksi



## SURAT KETERANGAN

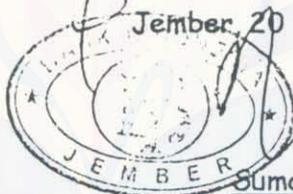
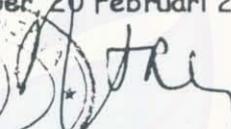
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **YENNY RAHMAWATI**  
N I M : 98 - 1021  
Program Studi : **ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang) di Kantor Bank Indonesia Jember terhitung tanggal 26 Februari sd 19 Maret 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Februari 2001



Sumantri  
Kepala Seksi

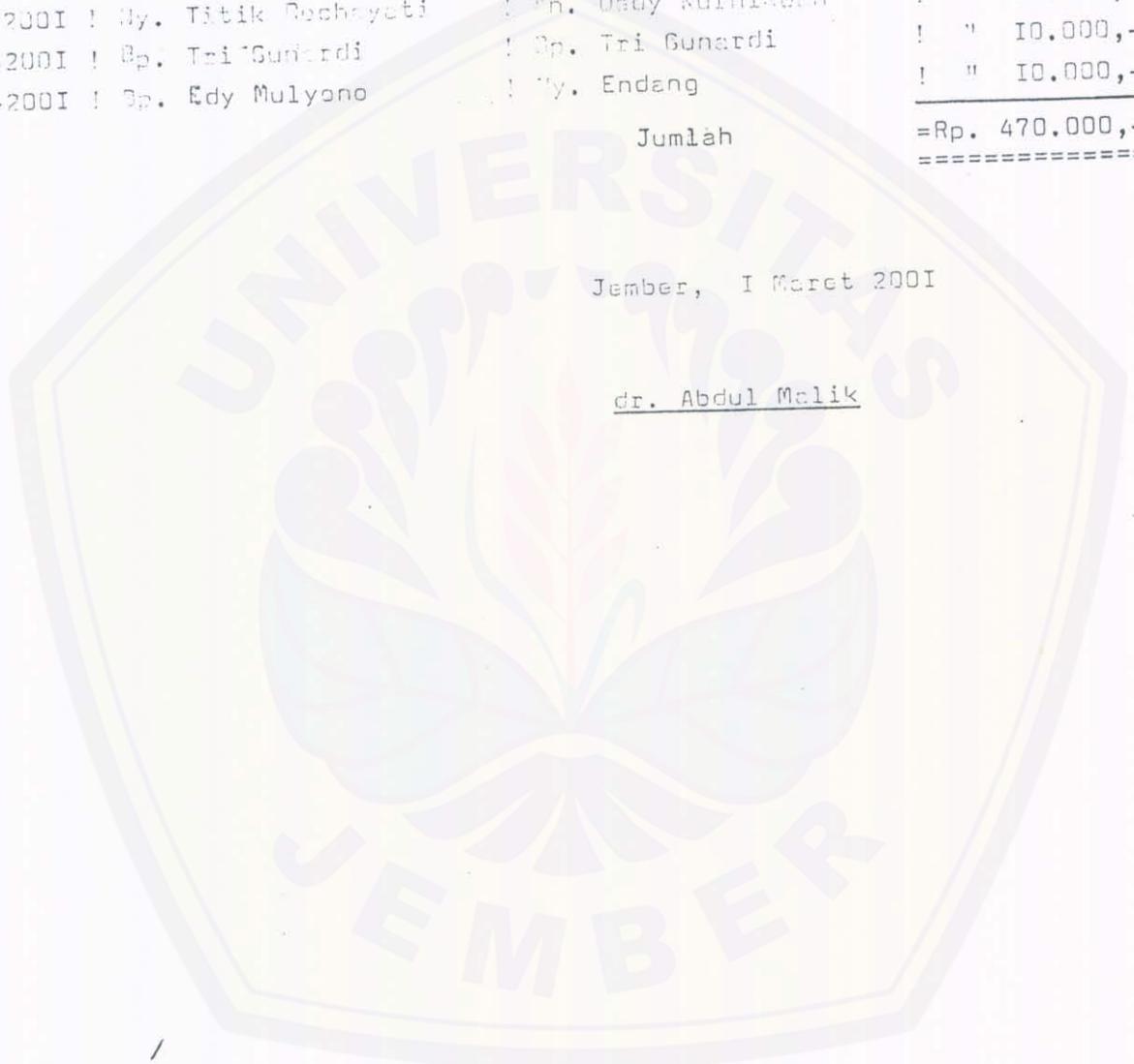
DAFTAR NAMA IKHTAR SANGREK DAN PASIEN I KELUAR  
 BANK INDONESIA JEMBER  
 BULAN : FEBRUARI 2001

NO.	TANGGAL	NAMA BEDAHAJ	NAMA PASIEN	BIAYA
I.	5-2-2001	Ny. Sri Handayani	Dr. Desi	Rp. 10.000,-
2.	5-2-2001	Bp. Tri Gunardi	Ny. Tri Gunardi	" 10.000,-
3.	5-2-2001	Bp. Agus Bhirawan	Ny. Agus Bhirawan	" 10.000,-
4.	5-2-2001	Bp. Agus Bhirawan	Bp. Yoga Wiyono	" 10.000,-
5.	8-2-2001	Ny. Titik Rochayati	Ny. Titik Rochayati	" 10.000,-
6.	8-2-2001	Bp. Eko Arianto	Bp. Eko Arianto	" 10.000,-
7.	8-2-2001	Bp. Imam Ainin	Ny. Isnawati	" 10.000,-
8.	8-2-2001	Ny. Martanti	Ny. Martanti	" 10.000,-
9.	8-2-2001	Ny. Martanti	Bp. Rigo	" 10.000,-
10.	8-2-2001	Bp. Andi Tri Wiloyo	Bp. Andi Tri Wiloyo	" 10.000,-
11.	8-2-2001	Bp. M. Hakim	Bp. M. Hakim	" 10.000,-
12.	8-2-2001	Bp. Budi Suharyanto	Ny. Budi Suharyanto	" 10.000,-
13.	8-2-2001	Bp. Haru P. Surya	Bp. Haru P. Surya	" 10.000,-
14.	8-2-2001	Bp. Andi Lukman	Bp. Andi Lukman	" 10.000,-
15.	10-2-2001	Bp. Agus Bhirawan	Bp. Dian Dany L.	" 10.000,-
16.	10-2-2001	Ny. Asrianing P.	Bp. Milasari	" 10.000,-
17.	15-2-2001	Ny. Titik Rochayati	Ny. Titik Rochayati	" 10.000,-
18.	15-2-2001	Bp. Slamet Santoso	Bp. Slamet Santoso	" 10.000,-
19.	15-2-2001	Bp. Eko Arianto	Ny. Eko Arianto	" 10.000,-
20.	15-2-2001	Bp. Imam Ainin	Bp. Imam Ainin	" 10.000,-
21.	15-2-2001	Bp. Soegeng	Bp. Soegeng	" 10.000,-
22.	15-2-2001	Bp. Moehammad	Bp. Moehammad	" 10.000,-
23.	15-2-2001	Bp. Imam Iswanto	Bp. Imam Iswanto	" 10.000,-
24.	17-2-2001	Ny. Sri Handayani	Dr. Desi	" 10.000,-
25.	17-2-2001	Bp. Tri Gunardi	Bp. Tri Gunardi	" 10.000,-
26.	19-2-2001	Bp. Suharyanto	Bp. Suharyanto	" 10.000,-
27.	19-2-2001	Bp. Budi Hariyawan	Ny. Mayadita	" 10.000,-
28.	22-2-2001	Ny. Sri Handayani	Ny. Sri Handayani	" 10.000,-
29.	22-2-2001	Ny. Sri Handayani	Bp. Fadilah	" 10.000,-
30.	22-2-2001	Bp. Slamet Santoso	Ny. Slamet Santoso	" 10.000,-
31.	22-2-2001	Bp. Slamet Santoso	Bp. Slamet Santoso	" 10.000,-
32.	22-2-2001	Bp. Eko Arianto	Bp. Eko Arianto	" 10.000,-
33.	22-2-2001	Ny. Asrianing P.	Bp. Anggara	" 10.000,-
34.	22-2-2001	Bp. Andi Tri Wiloyo	Ny. Dian Safitriani	" 10.000,-
35.	22-2-2001	Bp. M. Sakti Malik	Ny. Mita	" 10.000,-

6.	!	22-2-2001	!	Bp. Djoko Purnomo	:	Bp. Djoko Purnomo	!	Rp. 10.000,-
7.	!	24-2-2001	!	Bp. Budi Pramono	:	Bp. Budi Pramono	!	" 10.000,-
8.	!	24-2-2001	!	Bp. Moechammad	:	Bp. Moechammad	!	" 10.000,-
9.	!	24-2-2001	!	Bp. Soegono	:	Bp. Soegono	!	" 10.000,-
10.	!	24-2-2001	!	Bp. Imam Alim	:	Ny. Tisnawati	!	" 10.000,-
11.	!	24-2-2001	!	Bp. Tri Gunardi	:	Ny. Tri Gunardi	!	" 10.000,-
12.	!	24-2-2001	!	Ny. Titik Rochayati	:	Bn. Dedy Kurniawan	!	" 10.000,-
13.	!	27-2-2001	!	Ny. Sri Mandayani	:	Bn. Rudy	!	" 10.000,-
14.	!	27-2-2001	!	Ny. Titik Rochayati	:	Bn. Dinda	!	" 10.000,-
15.	!	27-2-2001	!	Ny. Titik Rochayati	:	Bn. Dedy Kurniawan	!	" 10.000,-
16.	!	27-2-2001	!	Bp. Tri Gunardi	:	Bp. Tri Gunardi	!	" 10.000,-
17.	!	27-2-2001	!	Bp. Edy Mulyono	:	Ny. Endang	!	" 10.000,-
							Jumlah	=Rp. 470.000,-
								=====

Jember, 1 Maret 2001

dr. Abdul Malik



SILVERHORSE KWITANSI

Kwitansi No. \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : Bank Indonesia Jember

Alamat : Jl. Gajah Mada 224 Jember

Jumlah uang (huruf) Empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah

Buat pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan pegawai/keluarga bln. Pebruari 2001

Mohon dipindahkan bukukan ke No. Rek. xxx-xxxxxxxxx Bank Mandiri Ex. Bank Exim Cab. Jember a.n. dr. Abdul Malik

Jember, I Maret 2001

Terbilang Rp. 470.000,00

dr. Abdul Malik

/



**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

Nomor : 3/Jr/01

Nama Wajib Pajak : dr. Abdul Malik  
N P W P : -  
Alamat : Jember

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp. 319.150,00		*)	Rp. 19.150,00
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp. ....		10 %	Rp. ....
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. ....	40 %	15 %	Rp. ....
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp. ....		*)	Rp. ....
5.	Imbalan Lainnya	Rp. ....		*)	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>					Rp. 19.150,00

\*) Lihat petunjuk pengisian.

Jember 28 Pebruari 2001

Pemotong Pajak,

Nama : ..Bank..Indonesia.....  
NPWP : ..I.002.035.2.626.....  
Alamat : ..Jl. Gajah Mada 224 Jember.....

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan, nama dan cap  
Kepala Seksi  
BANK INDONESIA



**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21**

Nomor : 3/Jr/02

Nama Wajib Pajak : dr. Abdul Malik

N P W P : -

Alamat : Jember

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Netto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp. 470.000,00		*)	Rp. 28.200,00
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp. ....		10 %	Rp. ....
3.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. ....	40 %	15 %	Rp. ....
4.	Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp. ....		*)	Rp. ....
5.	Imbalan Lainnya	Rp. ....		*)	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>					Rp. 28.200,00

\*) Lihat petunjuk pengisian.

Jember, 2 Maret 2001

Pemotong Pajak,

Nama : Bank Indonesia

NPWP : 1.002.035.2.626

Alamat : Jl. Gajah Mada 224 Jember

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda tangan, nama dan cap  
Kepala Seksi  
BANK INDONESIA



## DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

 Masa : Bulan **Pebruari** Tahun : **2001**

Uraian	No. Urut	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh. Pasal 21/26 yg dipotong (Rp.)	Keterangan
				tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. TIDAK FINAL	I.	-	dr. Abdul Malik	28-2-	3/Jr 2001 /01	Rp. 19.150,00	
	2.	-	dr. Abdul Malik	2-3-	3/Jr 2001 /02	Rp. 28.200,00	
JUMLAH A						Rp. 47.350,00	
B. FINAL							
JUMLAH B							
JUMLAH A + B						Rp. 47.350,00	

Jember 2 Maret 2001

Pemotong Pajak,

 Catatan :  
 Untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya dalam Kolom 8 (Keterangan) disebutkan "PPh Pasal 26"

 Nama : Bank Indonesia  
 NPWP : 1.002.035.3.826

 Tanda tangan dan cap  
 Kepala Seksi  
 BANK INDONESIA

LEMBAR

1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK**  
**( S S P )**

Untuk arsip WP

NPWP : <input type="text" value="I"/> - <input type="text" value="002"/> - <input type="text" value="035"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="626"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : Bank Indonesia	
Alamat WP : Jl. Gajah Mada 224 Jember	
Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="I"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Uraian Pembayaran *) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya pemeliharaan pegawai/keluarga untuk bulan Februari 2001	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	
Jan <input type="text" value=""/> Feb <input checked="" type="text" value="XXXXX"/> Mar <input type="text" value=""/> Apr <input type="text" value=""/> Mei <input type="text" value=""/> Jun <input type="text" value=""/> Jul <input type="text" value=""/> Ags <input type="text" value=""/> Sep <input type="text" value=""/> Okt <input type="text" value=""/> Nov <input type="text" value=""/> Des <input type="text" value=""/>	Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="I"/>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>	
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>	
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. 47.350,00	Terbilang : Empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah <small>Diisi dengan huruf</small>
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Jember, tgl. 2 Maret 2001 Kepala Seksi BANK INDONESIA <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas : .....	

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

LEMBAR **3**



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK  
( S S P )**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text" value="I"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>																									
Nama WP : Bank Indonesia																									
Alamat WP : Jl. Gajah Mada 224 Jember																									
Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>																									
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="I"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>																								
Uraian Pembayaran *) Pajak Penghasilan Pasal 21 : Diisi dengan nama wajib pajak/keluarga wajib pajak Februari 2001																									
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		X										
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des														
	X																								
Tahun <input type="text" value=""/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>																									
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>																									
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																									
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp. 47.350.00	Terbilang : Empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Diisi dengan huruf lima puluh Rupiah																								
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN																									
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor Jember, tgl. 2 Maret 2001 Kepala Seksi BANK INDONESIA <i>Cap dan tanda tangan</i>																								
Nama Jelas : .....																									

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 ;  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

LEMBAR **4**



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

**SURAT SETORAN PAJAK  
(S S P)**

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> - <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : Bank Indonesia	
Alamat WP : Jl. Gajah Mada 224 Jember	
Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="I"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>
Uraian Pembayaran *) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya pemeliharaan gedung/kegiatan untuk bulan Februari 2001	
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des	Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan	
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT	
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp. 47.350,00	Terbilang : Empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh
Diisi dengan huruf	
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor ..... tgl. .... Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : .....	

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1:  
 Tambahan Informasi:  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

LEMBAR **5**



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
J E M B E R

## SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Bank Indonesia

Alamat WP : Jl. Gajah Mada 224 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="I"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<u>Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya pemeriksaan pegawai/keluarga untuk bulan Februari 2001</u>

*Diisi sesuai dalat pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	<u>XXXX</u> Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
												<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :     /    /   /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang <i>Diisi dengan huruf</i>
Rp. <u>47.350,00</u>	<u>Empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah</u>

Ruang Teraan  
*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor ..... tgl. .... <i>Cap dan tanda tangan</i> BANK INDONESIA
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai dalat pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
J E M B E R  
.....  
di**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan ..... Februari ..... tahun 2011 ..... (1) adalah sebesar Rp. 47.350,00 ..... (1)

(..... Empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah .....)

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :**

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong ( Tarif x Penghasilan Bruto )
1	2	3	4
1. Pegawai Tetap	.....	Rp.....	Rp.....
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	.....	Rp.....	Rp.....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	.....	Rp.....	Rp.....
4. Pegawai Harian / Mingguan	.....	Rp.....	Rp.....
5. Pegawai Satuan	.....	Rp.....	Rp.....
6. Pegawai Borongan	.....	Rp.....	Rp.....
7. Pegawai Honorar	.....	Rp.....	Rp.....
8. Penerima Honorarium	I.....	Rp..... 789.150,00	Rp..... 47.350,00
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	.....	Rp.....	Rp.....
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	.....	Rp.....	Rp.....
11. Penerima Imbalan Jasa ( Orang Pribadi )	.....	Rp.....	Rp.....
<b>J U M L A H</b>		Rp..... 789.150,00	Rp..... 47.350,00
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp..... *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri* yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp..... **)

**B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :**

Penerima Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong (taarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	.....	Rp.....	Rp.....
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	.....	Rp.....	Rp.....
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	.....	Rp.....	Rp.....
<b>JUMLAH</b>		Rp.....	Rp.....

**C. Lampiran :**

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak ...2.....(.....dua.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember, 7 Maret 19.....2001 <sup>(6)</sup>

Pemotong Pajak, <sup>(7)</sup>

**DIISI OLEH KPP**

Diterima tanggal .....19.....<sup>(4)</sup>

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....<sup>(5)</sup>

NIP. ....

Nama : ..Bank..Indonesia.....  
 NPWP : I.002.035.2.626  
 Alamat : Jl. Gajah Mada 224 Jember

Tanda tangan, nama dan cap  
 Kepala Seksi  
 BANK INDONESIA

.....<sup>(8)</sup>

- \* ) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
- \*\* ) Coret yang tidak perlu.